

**KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (SOCIAL FORESTRY) DI DESA WONOASRI
SPTN II TAMAN NASIONAL MERU BETIRI KABUPATEN JEMBER**
*Social Forestry Management Partnership In Wonoasri Village SPTN II
Meru Betiri National Park Jember Regency*

Bogiek S. Indraguna, Evita Soliha Hani*, Joni Murthi Mulyo A

Program Studi Agribisni, Fakultas Pertanian, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 1 No 23, Jember 68121
*E-mail : ita_hani@yahoo.com

ABSTRACT

The community around Meru Betiri National Park plundering the forest which is “protected forest”. The community take control of this land to farm on it. Meru Betiri National Park as the land authority hold make policy to solve it, one of it is creating partnership with the community. The main objective from this research are : First, identify the model of partnership and its form patterns sharing. Second, knowing the contribution of forest farmers' income from the farming activities. Third, to formulate alternative policy that can be considered effective to develop the management partnerships activities in the Wonoasri Village SPTN II Meru Betiri National Park. Research areas determined by purposive method, which is in the rehabilitation zone Meru Betiri National Park in the Wonoasri Village National Park Management Section (SPTN) II. Method of sampling was used multistage sampling. First issue was used analytical description, second issue was used analysis of the contribution of farmers' income', and third issue was used the analysis of 'SWOT'. Results showed (1) Partnership community forest management activities in Wonoasri Village SPTN II Meru Betiri National Park was patterned as 'synergistic cooperation', it has “mutual synergy” type, and evolve as 'partnership intermediate stage'. (2) Partnership farming income contribution, relatively big : (47.21%) based on financial and (41.85%) based on economic calculations. (3) The selected strategies to formulate alternative policy in Meru Betiri National Park is 'WT strategy' (weakness-threat). WT strategy can be detailed : (1) increasing forest farmers and the partnership community members around Taman Nasional area about awareness, understanding of partnership and the Taman Nasional existence, (2) Increasing number of skillfull officer from Taman Nasional as field educator for the partnership community members, (3) Try get more funds support from the Government for the community members partnership education, (4) Asking the government together with some society intitution, and many stakeholder to work together make the policy to support partnership education and rehabilitation activities, (5) Active campaign to all domestic or even overseas defenders of environmental sustainability institutions and organizations to take place in many programs of forest rehabilitation, and support the partnership activities in the Meru Betiri National Park forest zone .

Keywords: Partnership, Revenue Contribution, and development strategy.

ABSTRAK

Masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri melakukan penjarahan hutan di kawasan yang merupakan “hutan lindung”. Masyarakat menguasai lahan untuk bercocok tanam (berusahatani). Taman Nasional Meru Betiri selaku pemegang hak kelola lahan membuat kebijakan untuk mengatasinya, salah satunya dengan pembentukan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah : *Pertama*, mengidentifikasi model kemitraan dan wujud pola *sharing*-nya. *Kedua*, Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan dari aktivitas usahatani tersebut. *Ketiga*, merumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipandang efektif untuk mengembangkan aktivitas kemitraan pengelolaan di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri. Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive method*), yaitu di zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri di Desa Wonoasri Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II. Metode pengambilan contoh (sampel) yang digunakan adalah pengambilan contoh bertahap (*multistage sampling*). Permasalahan *pertama* menggunakan analisis ‘deskriptif’, permasalahan *kedua* menggunakan analisis ‘kontribusi pendapatan petani’ dan permasalahan *ketiga* menggunakan analisis ‘SWOT’. Hasil penelitian menunjukkan (1) Aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, berpola ‘kerjasama sinergis’, memiliki tipe ‘sinergis saling menguntungkan’, dan berkembang sebagai ‘kemitraan tahap madya’. (2) kontribusi pendapatan dari usahatani di lahan *social forestry* terhadap pendapatan keluarga, relatif besar. 47,21% berdasarkan perhitungan secara finansial, dan 41,85% berdasarkan perhitungan secara ekonomik. (3) Strategi terpilih guna dapat merumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipandang efektif di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk keberlanjutannya di Desa Wonoasri, adalah ‘strategi WT’ (*weaknes-threat*). Strategi WT dapat dijabarkan sebagai berikut (1) Meningkatkan petani hutan dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) peserta rehabilitasi terhadap kesadaran, ‘kesepahaman kemitraan’ dan ‘eksistensi taman nasional’. (2) Berupaya menambah jumlah penyuluh ahli dari pihak Taman Nasional sebagai pembina dan pemberdaya petani peserta kemitraan. (3) Berupaya mendapatkan dukungan dana yang optimal untuk membiayai aktivitas pembinaan kepada petani hutan peserta rehabilitasi. (4) Secara berkelanjutan (sustainable) mengajak Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat, dan stakeholder untuk dapat bersama-sama bekerjasama membuat kebijakan terhadap pembinaan kemitraan dan pemberdayaan petani hutan peserta rehabilitasi. (5) Aktif melakukan kampanye kepada lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi pembela kelestarian lingkungan hidup, baik dari dalam maupun luar negeri, guna ikut serta berperan aktif dalam program-program rehabilitasi lahan, dan selalu mendukung segala kegiatan kemitraan di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri.

Keywords: Pola Kemitraan, Kontribusi pendapatan, strategi pengembangan

How to cite: Indraguna S.B, Hani Soliha E, Aji Mulyo M.J, *Kemitraan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (social Forstry) di desa wonoasri SPTN II Taman Nasional Merubetiri ., Berkala Ilmiah Pertanian 1(1): xx-xx*

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk modal pembangunan nasional yang penting, karena memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa. Baik kemanfaatan dari aspek ekonomi, sekologi, maupun sosial (UU No. 41 Tahun 1999). Demikian pula hutan Indonesia adalah sebagai penentu sistem penyangga ekologi yang memiliki peranan penting sebagai penyerasi (penyeimbang) lingkungan global (dunia).

Hadi (2013) menyatakan, dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur, akibat dari *illegal logging*, dewasa ini sedikitnya sekitar 660 ribu Ha, atau lebih dari 50% hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur telah mengalami kerusakan. Kemudian yang lebih memprihatinkan, sekitar 500 ribu Ha hutan yang rusak tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung. Sementara itu yang sekitar 160 ribu Ha berada didalam kawasan hutan produksi. Sebagaimana yang terjadi dan berlangsung di sebagian kawasan hutan penyangga taman nasional di Taman Nasional Meru Betiri. Dijelaskan oleh Syarif (2012), pada saat itu hutan jati eks-Perhutani seluas sekitar 1.063 Ha yang berfungsi sebagai ‘zona rimba’ taman nasional Meru Betiri, dijarah dan ditebang habis oleh masyarakat. Atau terjadi peristiwa deforestasi pada zona rimba Taman Nasional Meru Betiri. Selanjutnya masyarakat menguasai lahan jarahan tersebut dan menggunakannya untuk bercocok tanam (berusahatani).

Konflik kepentingan atas sumberdaya lahan antara pihak Taman Nasional Meru Betiri dengan masyarakat penjarah yang telah menguasai lahan tersebut. Terjadi *tragedy of the common* di bekas hutan jati esk-Perhutani yang berfungsi sebagai zona rimba penyangga Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Pihak taman nasional berkepentingan untuk menghutankan kembali (reforestasi) kawasan yang berfungsi sebagai zona rimba taman nasional tersebut. Sedangkan masyarakat tidak mau melepas lahan jarahannya ke pihak taman nasional, dan tetap menggunakannya untuk berusahatani. Utamanya usahatani tani tanaman semusim (palawija).

Mengatasi *tragedy of the common* tersebut terus-menerus berlanjut dan keadaannya semakin lama semakin meruncing (memprihatinkan), maka dilepaslah program kerjasama kemitraan (*partnership*) antara masyarakat yang telah menguasai lahan jarahan dengan pihak taman nasional. Yaitu kerjasama kemitraan untuk mengelola secara bersama-sama lahan kawasan zona yang mengalami deforestasi tersebut. Akan tetapi pengolaan yang dilakukan adalah untuk tujuan melakukan rehabilitasi kawasan zona rimba yang mengalami deforestasi tersebut.

Aktivitas kemitraan yang dilakukan di zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri ini, adalah merupakan salah wujud dari beberapa model kerjasama kemitraan dalam kerangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan/*social forestry* (Syarif, 2012). Beberapa model kerjasama kemitraan dalam kerangka *social forestry* ini memang digiatkan pemerintah (Departemen Kehutanan) pasaca terjadinya ‘bencana ekologi’ antara tahun 1997-1998 (Soekamdi, 2003). Masing-masing model memiliki karakteristik dengan kekhasan masing-masing, sesuai dengan kemanfaatan (*benefit*) dan nilai tambah (*value added*) yang diinginkan. Model yang diterapkan di kawasan hutan produksi tentunya akan berbeda dengan yang diterapkan pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi (Wirawanto, 2009).

Zona rebalitasi kawasan Taman Nasional Meru Betiri, aktvitas kemitraan dalam penyelenggaraan *social forestry* ini melibatkan banyak sekali petani hutan, atau petani hutan peserta rehabilitasi. Jumlah petani hutan yang dilibatkan di zona rehabilitasi Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) I Sorongan adalah 739 orang dan dibagi menjadi 29 kelompok tani. Jumlah petani yang dilibatkan di zona rebalitasi SPTN II Ambulu adalah 4.503 orang dan dibagi menjadi 87 kelompok tani.

Petani hutan peserta rehabilitasi di zona rebalitasi SPTN II Ambulu, tersebar dalam 3 (tiga) wilayah desa, yaitu Wonoasri, Andongsari, dan Sanenrejo. Petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri berjumlah 226 orang dan terdistribusi kedalam 27

kelompok tani hutan. Petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Andongrejo berjumlah 455 orang dan terbagi kedalam 28 kelompok tani hutan. Sedangkan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Sanenrejo berjumlah 498 orang dan terdistribusi kedalam 32 kelompok tani hutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui model kemitraan dan wujud pola *sharing*-nya pada aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri tersebut, (2) Mengetahui kontribusi pendapatan petani hutan dari aktivitas usahatani kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri tersebut, terhadap pendapatan keluarganya, (3) Mengetahui alternatif kebijakan yang dapat dipandang efektif (*grand strategy* kebijakan), guna mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive method*), yaitu di zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri di Desa Wonoasri Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Taman Nasional Meru Betiri, dengan pertimbangan aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) yang berkembang, adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan di desa lain di lingkup SPTN II Taman Nasional Meru Betiri tersebut (Hadi, 2013).

Metode pengambilan contoh (sampel) yang digunakan adalah pengambilan contoh bertahap (*multistage sampling*), yaitu sebanyak 30 orang petani hutan peserta rehabilitasi yang berusahatani di lahan kemitraan *social forestry* di zona rehabilitasi SPTN II Taman Nasional Meru Betiri tersebut.

Tujuan *ke-1* dalam penelitian ini, yaitu: “Mengidentifikasi model kemitraan dan wujud pola *sharing*-nya pada aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri”, dipergunakan pendekatan analisis ‘deskriptif’ berupa penjelasan dan gambaran untuk menggambarkan keadaan/status fenomena mengenai fakta di lapangan.

Tujuan *ke-2* dalam penelitian ini, yaitu: “Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan dari aktivitas usahatani kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri tersebut, terhadap pendapatan keluarganya”, dipergunakan analisis ‘kontribusi pendapatan petani’. Sebagaimana dikonsepsikan oleh Soekartawi (1986), adalah sebagai berikut:

$$I_{UT-kontribusi} = \left(\frac{I_{UT-net}}{I_k} \right) \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

dan:

$$I_{UT-net} = TR - TC \dots\dots\dots (3.2)$$

$$TR = I_{UT-gross} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$I_k = I_{UT-net} + I_{non-UT} + I_{farm} + I_{non-farm} \dots\dots (3.4)$$

Dimana:

$I_{UTkontribusi}$

= Kontribusi pendapatan bersih usahatani di

lahan kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan % (persen).

I_{UT-net}

= Pendapatan bersih kegiatan usahatani

dalam kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

$I_{UT-gros}$

= Pendapatan kotor kegiatan usahatani dalam

kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

TC

= Total biaya (*total cost*) usahatani dalam kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

TR

= Total penerimaan (*total revenue*) usahatani dalam kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

I_k

= Total pendapatan bersih keluarga petani

desa hutan, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

I_{non-UT}

= Pendapatan bersih keluarga petani desa

hutan dari usahatani selain kegiatan usahatani mitra di lahan kawasan hutan wilayah II Taman Nasional Meru Betiri, dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

I_{farm}

= Pendapatan bersih keluarga petani desa

hutan dari usaha pertanian di luar usahatani budidaya tanaman (buruh tani, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha perikanan, usaha agroindustri, usaha agribisnis), dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

$I_{non-farm}$

= Pendapatan bersih keluarga petani desa

hutan dari usaha non-pertanian (tukang ojek, buruh bangunan, pedagang, lainnya), dinyatakan dalam satuan Rp/tahun.

Tujuan ke-3 dalam penelitian ini, yaitu: “Merumuskan alternatif kebijakan yang dipandang efektif, guna mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri ini ke depan”, dipergunakan analisis SWOT yaitu interaksi dari hasil analisis matriks evaluasi faktor internal (matriks-EFI) dan matriks evaluasi faktor eksternal (matriks-EFE) Soesilo (2000).

HASIL

Model Kemitraan dan Pola Bagi Hasil (*Sharing*)

Zona rehabilitasi, dalam pengertiannya adalah bagian dari areal taman nasional yang oleh karena mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya (Permenhut No. P.56/MENHUT-II/2006).

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, maka ditetapkanlah Surat Keputusan Dirjen PKA No. 185/Kpts./Dj-V/ 1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang zona rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri ini.

Pengertian rehabilitasi hutan sendiri adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahannya sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Permenhut No. 32/Menhut-V/2006 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Akan tetapi ditekankan juga dalam Permenhut tersebut, bahwa guna mencapai ‘keefektifan’ dalam pelaksanaan rehabilitasi, maka diperlukan suatu bentuk ‘pengelolaan bersama’ (*co-management*). Yaitu antara masyarakat dengan pihak pemangku kawasan hutan sebagai stakeholder dengan kegiatan kemitraan dengan masyarakat desa sekitar kawasan hutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan (*social forestry*). Pada kegiatan kemitraan ini, kedua belah pihak yang terlibat akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Tabel 1 Pola *Sharing* dalam Aktivitas Kemitraan Di Desa Wonoasri dalam Kerangka Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (*Social Forestry*) di Taman Nasional Meru Betiri

Pola <i>Sharing</i>	Secara Eksplisit (<i>Explicit</i>)	Secara Implisit (<i>Implicit</i>)
<i>Cost sharing</i>	Pihak petani hutan peserta rehabilitasi menanggung beban <i>sharing</i> relatif lebih tinggi.	Pihak Taman Nasional Meru Betiri menanggung beban <i>sharing</i> relatif lebih tinggi.
<i>Benefit sharing</i>	Pihak petani hutan peserta rehabilitasi mendapatkan semua bagian <i>benefit</i> -nya (kemanfaatannya).	Bagian <i>sharing</i> yang diterima oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri dan petani hutan peserta rehabilitasi relatif berimbang (<i>balance</i>).
<i>Risk sharing</i>	Pihak petani hutan peserta rehabilitasi menanggung potensi risiko (<i>risk</i>) yang relatif rendah. Sementara pihak Taman Nasional Meru Betiri tidak memiliki potensi risiko (<i>risk</i>) ini.	Pihak Taman Nasional Meru Betiri menanggung beban seluruh potensi risiko (<i>risk</i>).

Sumber : Data Primer dioalah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1 diatas pola kemitraan yang dilakukan memiliki kedudukan yang setara, dalam arti bahwa pihak taman nasional ‘bukanlah’ merupakan ‘bapak angkat’ bagi petani hutan peserta rehabilitasi. Bapak angkat, dalam pengertian harus selalu melindungi, memfasilitasi, dan membesarkan para petani hutan peserta rehabilitasi tersebut sebagai ‘anak’-nya. Baik itu melindungi, memfasilitasi, dan membesarkan dalam penyediaan modal, teknologi, pelatihan, maupun pemasaran produk yang dihasilkan petani hutan peserta rehabilitasi.

Pihak taman nasional ‘tidak’ menempatkan dirinya (kelembagaannya) sebagai sebagai sumber modal, teknologi, pemasok *input*, dan pembeli produk yang dihasilkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi tersebut. Akan tetapi yang ada dan berlangsung adalah, bahwa pihak taman nasional mengajak petani hutan peserta rehabilitasi, untuk ikut serta secara bersama-sama mengelola zona rimba taman nasional yang telah rusak karena penjarahan yang berlangsung di era reformasi (tahun 1998).

Nilai tambah (*value added*) yang dapat diterima oleh pihak taman nasional, adalah ‘jaminan rasa aman’ akan kelestarian ‘kawasan penyangga taman nasional’ dari ‘potensi’ ancaman dan gangguan penjarahan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional. Termasuk

didalamnya mereka yang berada di desa Wonosari. Sedangkan nilai tambah yang dapat diterima oleh petani hutan peserta rehabilitasi, adalah adanya tambahan pendapatan keluarga dari dari hasil mengelola secara kerjasama kemitraan zona rehabilitasi taman nasional. Dengan demikian tingkat kesejahteraan keluarganya menjadi relatif meningkat.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Tumpangsari

Mayoritas petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri menanam tanaman PJ (*Pueraria javanica*) secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Rata-rata luasan lahan kemitraan yang dikelola per kepala keluarga (KK) petani hutan adalah 0,44 Ha per KK. Hasil panen yang diperoleh per KK petani tanaman PJ (*Pueraria javanica*) selama 1 (satu) tahun usahatani. Analisis Usahatani tumpangsari tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rata-Rata Biaya, Penerimaan, Keuntungan, dan R/C-ratio per KK Petani Hutan Peserta Rehabilitasi, dalam Usahatani Setahun Tanaman PJ Tumpangsari di Sela-Sela Tanaman Pokok di Lahan Kemitraan *Social Forestry* Taman Nasional Meru Betiri di Desa Wonoasri, Tahun 2013.

No	Item	Secara Finansial	Secara Ekonomik
		(Rp)	(Rp)
1.	Biaya tetap (<i>fixed cost</i>):	0	4,620,000.00
	1.1 Sewa lahan	0	4,400,000.00
	1.2 Pajak lahan	0	220,000.00
	1.3 Iuran pengairan	0	0
2.	Biaya variabel (<i>variable cost</i>):	6,318,074.15	8,916,475.47
	2.1 Pembelian benih	4,483.02	4,483.02
	2.2 Sewa bajak	0	0
	2.3 Pembelian pupuk:	570,409.36	570,409.36
	2.3.1 Kandang	21,219.62	21,219.62
	2.3.2 Urea	77,509.74	77,509.74
	2.3.3 Gandasil B	168,960.00	168,960.00
	2.3.4 Kalsium	70,400.00	70,400.00
	2.3.5 NPK cair	232,320.00	232,320.00
	2.4 Pembelian pestisida:	329,120.00	329,120.00
	2.4.1 Desis	209,440.00	209,440.00
	2.4.2 Green Ionik	119,680.00	119,680.00
	2.5 Sewa alat-alat pertanian:	194,709.13	271,069.89
	2.5.1 Cangkul	0	47,221.13
	2.5.2 Sabit	0	29,139.62
	2.5.3 Terpal	180,928.00	180,928.00
	2.5.4 Karung	13,781.13	13,781.13
	2.6 Upah tenaga kerja:	5,119,730.00	7,641,770.57
	2.6.1 Pengolahan tanah	223,735.85	365,677.36
	2.6.2 Penanaman	364,195.47	592,841.89
	2.6.3 Pemeliharaan tanaman	1,918,781.89	2,982,544.15
	2.6.4 Panen dan pasca panen	2,613,016.79	3,700,707.17
	2.7 Transportasi	99,622.64	99,622.64
3.	Biaya total (<i>total cost</i>)	6,318,074.15	13,536,475.47
4.	Penerimaan (<i>revenue</i>)	15,826,716.98	15,826,716.98
5.	Keuntungan (<i>provit</i>)	9,508,642.83	2,290,241.51
6.	R/C-ratio	2.50	1.17

Sumber : Data primer dioalah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, usahatani tanaman PJ tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang didapatkan, yaitu sebesar 2,50. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1,- yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya perusahaan tanaman PJ tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 2,50 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,50,-. Berarti tercatat relatif efisien.

Analisis secara ekonomik dengan memasukkan semua unsur biaya (*total cost*), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*),

rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman PJ tersebut adalah Rp 13,536,475.47,- per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani tanaman PJ yang diusahakan secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok, di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 2,290,241.51.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Tanaman Pokok

Tanaman pokok yang ditanam petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri di lahan kemitraan Taman Nasional Meru Betiri, diantaranya adalah alpokat, nangka, dan pete. Dengan rata-rata luasan lahan kemitraan 0,44 Ha per KK, dapat diketahui rata-rata penerimaan per KK petani hutan di Desa Wonoasri, dari usahatani tanaman pokok dengan ketetapan batas umur pertumbuhan antara 8 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, adalah sebesar Rp 14,602,022.64. Analisis Usahatani tanaman pokok dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rata-Rata Biaya, Penerimaan, Keuntungan, dan R/C-ratio per KK Petani Hutan Peserta Rehabilitasi, dalam Usahatani Setahun Tanaman Pokok di Lahan Kemitraan *Social Forestry* Taman Nasional Meru Betiri di Desa Wonoasri, Tahun 2013.

No	Item	Secara Finansial	Secara Ekonomik
		(Rp)	(Rp)
1.	Biaya tetap (<i>fixed cost</i>):	0	0
	1.1 Sewa lahan*)	0	0
	1.2 Pajak lahan*)	0	0
	1.3 Iuran pengairan	0	0
2.	Biaya variabel (<i>variable cost</i>):	5,608,991.32	8,166,947.92
	2.1 Pembelian bibit*)	0	0
	2.2 Sewa bajak	0	0
	2.3 Pembelian pupuk:	797,479.25	804,618.87
	2.3.1 Kandang	0	7,139.62
	2.3.2 Urea	448,800.00	448,800.00
	2.3.3 ZA	348,679.25	348,679.25
	2.4 Pembelian pestisida:	0	0
	2.4.1 Herbisida	0	0
	2.4.2 Fungisida	0	0
	2.4.3 Insektisida	0	0
	2.5 Sewa alat-alat pertanian:	13,781.13	88,946.42
	2.5.1 Cangkul	0	46,025.66
	2.5.2 Sabit	0	29,139.62
	2.5.3 Karung	13,781.13	13,781.13
	2.6 Upah tenaga kerja:	4,760,488.68	7,236,140.4
	2.6.1 Pengolahan tanah*)	0	0
	2.6.2 Penanaman*)	0	0
	2.6.3 Pemeliharaan tanaman	2,567,732.08	4,315,399.6
	2.6.4 Panen dan pasca panen	2,192,756.60	2,920,740.6
	2.7 Transportasi	37,242.26	37,242.26
3.	Biaya total (<i>total cost</i>)	5,608,991.32	8,166,947.9
4.	Penerimaan (<i>revenue</i>)	14,602,022.64	14,602,023
5.	Keuntungan (<i>provit</i>)	8,993,031.32	6,435,074.7
6.	R/C-ratio	2.60	1.79

Keterangan: *) adalah *sunk cost*

Sumber : Data primer dioalah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 3, usahatani tanaman pokok tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang didapatkan, yaitu sebesar 2,60. Artinya adalah, dari setiap Rp 1,- yang dikeluarkan untuk biaya perusahaan tanaman pokok tersebut, menghasilkan sebesar Rp 2,60,-. Berarti tercatat relatif efisien.

Analisis secara ekonomik dengan memasukkan semua unsur biaya (*total cost*), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman pokok

tersebut adalah Rp 8,140,415.09,- per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani tanaman pokok yang diusahakan, di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 6,461,607.55,-.

Usahatani tanaman pokok tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang sebesar 1,79. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1,- rupiah yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman pokok tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 1,79 satuan mata uang, atau sebesar Rp 1,79,-. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif efisien.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Lahan Milik Sendiri

Sebagian besar petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri disamping menguasai garapan di areal kemitraan juga memiliki lahan (khususnya lahan sawah) sendiri. Rata-rata kepemilikan lahan sawah per kepala keluarga (KK) petani adalah 0,29 Ha. Pada musim tanam *ke-1* (pertama) mereka mengusahakan tanaman padi. Pada musim tanam *ke-2* (kedua) mereka mengusahakan tanaman jagung. Sedangkan pada musim tanam *ke-3* (ketiga) ada yang mengusahakan tanaman jagung dan ada pula yang mengusahakan tanaman kacang tanah.

Tabel 4. Rata-Rata Biaya, Penerimaan, Keuntungan, dan R/C-ratio Usahatani Padi per Kepala Keluarga (KK) Petani Hutan Peserta Rehabilitasi di Desa Wonoasri, di Lahan Miliknya Sendiri, pada Musim Tanam *ke-1* Tahun 2013.

No	Item	Secara Finansial (Rp)	Secara Ekonomik (Rp)	
1.	Biaya tetap (<i>fixed cost</i>):	198.000,00	1.631.333,33	
	1.1 Sewa lahan	0	1.433.333,33	
	1.2 Pajak lahan	143.333,33	143.333,33	
	1.3 Iuran pengairan	54.666,67	54.666,67	
2.	Biaya variabel (<i>variable cost</i>):	1.662.733,33	2.768.938	
	2.1 Pembelian benih	222.833,33	380.333,33	
	2.2 Sewa bajak	176.666,67	267.666,67	
	2.3 Pembelian pupuk:	801.000,00	801.000,00	
		2.3.1 Kandang	0	0
		2.3.2 Urea	493.000,00	493.000,00
		2.3.3 Za	289.333,33	289.333,33
	2.3.4 Lainnya	18.667,67	18.667,67	
	2.4 Pembelian pestisida:	34.666,67	34.666,67	
		2.4.1 Desis	30.600,00	30.600,00
		2.4.2 Lainnya	4.066,67	4.066,67
	2.5 Sewa alat-alat pertanian:	83.333,33	206.621,11	
		2.5.1 Cangkul	0	6.100,00
		2.5.2 Sabit	0	6.583,33
		2.5.3 Terpal	0	60.537,78
		2.5.4 Karung	168.965,52	168.965,52
		2.5.5 Treser	287.356,32	287.356,32
		2.5.6 Lainnya	0	1.066,67
	2.6 Upah tenaga kerja:	851.900,00	1.586.316,67	
		2.6.1 Persemaian	42.933,33	164.850,00
2.6.2 Pengolahan tanah		99.166,67	177.800,00	
2.6.3 Penanaman		83.533,33	121.800,00	
2.6.4 Pemeliharaan tanaman		351.866,67	616.233,33	
2.6.5 Panen dan pasca panen		274.400,00	505.633,33	
2.7 Transportasi		293.333,33	293.333,33	
3.	Biaya total (<i>total cost</i>)	1.860.733,33	4.400.271,00	
4.	Penerimaan (<i>revenue</i>)	4.452.000,00	4.452.000,00	
5.	Keuntungan (<i>provit</i>)	2.951.266,67	51.728,89	
6.	R/C-ratio	2,39	1,01	

Sumber : Data primer dialah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4, usahatani padi tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang didapatkan, yaitu sebesar 2,39. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1,- yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman padi tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 2,39 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,39. Berarti tercatat relatif efisien. Secara ekonomik usahatani padi tersebut relatif kurang efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang sebesar 1,01. Artinya adalah, dari setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan untuk biaya pengusahaan tanaman padi tersebut, hanya menghasilkan Rp 1,01,- saja. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif kurang efisien. Sedangkan pada musim tanam *ke-2*) para petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri ini, menanam lahan (lahan sawah) miliknya sendiri (hak milik) dengan tanaman jagung. Analisis usahatani tanam *ke-2* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut

Tabel 5. Rata-Rata Biaya, Penerimaan, Keuntungan, dan R/C-ratio Usahatani Jagung per Kepala Keluarga (KK) Petani Hutan Peserta Rehabilitasi di Desa Wonoasri, di Lahan Miliknya Sendiri, pada Musim Tanam *ke-2* Tahun 2013.

No	Item	Secara Finansial (Rp)	Secara Ekonomik (Rp)	
1.	Biaya tetap (<i>fixed cost</i>):	218.000,00	1.651.333,33	
	1.1 Sewa lahan	0	1.433.333,33	
	1.2 Pajak lahan	143.333,33	143.333,33	
	1.3 Iuran pengairan	74.666,67	74.666,67	
2.	Biaya variabel (<i>variable cost</i>):	3.404.733,33	5.021.954,44	
	2.1 Pembelian benih	0	446.333,33	
	2.2 Sewa bajak	176.666,67	267.666,67	
	2.3 Pembelian pupuk:	360.866,67	474.200,00	
		2.3.1 Kandang	178.333,33	291.666,67
		2.3.2 Urea	74.800,00	74.800,00
		2.3.3 Ponska	96.066,67	96.066,67
	2.3.4 Lainnya	11.666,67	11.666,67	
	2.4 Pembelian pestisida:	70.266,67	70.266,67	
		2.4.1 Puradan	34.166,67	34.166,67
		2.4.2 Lainnya	36.100,00	36.100,00
	2.5 Sewa alat-alat pertanian:	77.000,00	151.287,78	
		2.5.1 Cangkul	0	6.100,00
		2.5.2 Sabit	0	6.583,33
		2.5.3 Terpal	0	60.537,78
		2.5.4 Karung	77.000,00	77.000,00
		2.5.5 Lainnya	0	1.066,67
	2.6 Upah tenaga kerja:	2.476.600,00	3.368.866,67	
		2.6.1 Pengolahan tanah	168.000,00	242.666,67
		2.6.2 Penanaman & sulam	232.866,67	358.633,33
2.6.3 Pemeliharaan tanaman		703.733,33	933.100,00	
2.6.4 Panen dan pasca panen		1.372.000,00	1.834.466,67	
2.7 Transportasi	243.333,33	243.333,33		
3.	Biaya total (<i>total cost</i>)	3.622.733,33	6.673.287,78	
4.	Penerimaan (<i>revenue</i>)	8.705.833,33	8.705.833,33	
5.	Keuntungan (<i>provit</i>)	5.083.100,00	2.032.545,56	
6.	R/C-ratio	2,40	1,30	

Sumber : Data primer dialah Tahun 2014

Usahatani jagung tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang didapatkan, yaitu sebesar 2,4. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman jagung tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 2,4 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,4. Berarti tercatat relatif efisien. Apabila dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (*total cost*), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani jagung tersebut adalah Rp 6.673.287,78 per KK petani. Secara ekonomik usahatani jagung tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis *RC-ratio* yang sebesar 1,30. Pada musim tanam *ke-3* (ketiga) para

petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri ini, menanam lahan (lahan sawah) miliknya sendiri (hak milik) dengan tanaman kacang tanah. Analisis usahatani tanam ke-2 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-Rata Biaya, Penerimaan, Keuntungan, dan R/C-ratio Usahatani Kacang Tanah per Kepala Keluarga (KK) Petani Hutan Peserta Rehabilitasi di Desa Wonoasri, di Lahan Miliknya Sendiri, pada Musim Tanam ke-3 Tahun 2013.

No	Item	Secara Finansial (Rp)	Secara Ekonomi (Rp)	
1.	Biaya tetap (<i>fixed cost</i>):	218.000,00	1.651.333,33	
	1.1 Sewa lahan	0	1.433.333,33	
	1.2 Pajak lahan	143.333,33	143.333,33	
	1.3 Iuran pengairan	74.666,67	74.666,67	
2.	Biaya variabel (<i>variable cost</i>):	4.161.150,00	5.433.487,78	
	2.1 Pembelian benih	174.400,00	274.400,00	
	2.2 Sewa bajak	176.666,67	267.666,67	
	2.3 Pembelian pupuk:	2.3.1 Kandang	178.333,33	291.666,67
		2.3.2 Urea	79.616,67	79.616,67
		2.3.3 Ponska	157.666,67	157.666,67
		2.3.4 Lainnya	40.000,00	40.000,00
		2.4 Pembelian pestisida:	67.866,67	67.866,67
	2.4.1 Puradan	34.166,67	34.166,67	
	2.4.2 Lainnya	33.700,00	33.700,00	
	2.5 Sewa alat-alat pertanian:	2.5.1 Cangkul	0	6.100,00
		2.5.2 Sabit	0	6.583,33
		2.5.3 Terpal	0	60.537,78
		2.5.4 Karung	67.333,33	67.333,33
		2.5.5 Lainnya	0	1.066,67
		2.6 Upah tenaga kerja:	2.975.933,33	3.779.650,00
	2.6.1 Pengolahan tanah	2.975.933,33	242.666,67	
2.6.2 Penanaman & sulam	168.000,00	358.633,33		
2.6.3 Pemeliharaan tanaman	232.866,67	829.850,00		
2.6.4 Panen dan pasca panen	1.946.000,00	2.348.500,00		
2.7 Transportasi	243.333,33	243.333,33		
3.	Biaya total (<i>total cost</i>)	4.379.150,00	6.994.821,11	
4.	Penerimaan (<i>revenue</i>)	8.210.000,00	8.210.000,00	
5.	Keuntungan (<i>provit</i>)	3.830.850,00	1.215.178,89	
6.	R/C-ratio	1,87	1,17	

Sumber : Data primer dioalah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 6, usahatani kacang tanah tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 1,87. Artinya adalah, dari setiap Rp 1 yang dikeluarkan untuk biaya pengusahaan tanaman kacang tanah tersebut, menghasilkan sebesar Rp 1,87. Berarti tercatat relatif efisien. Secara ekonomik usahatani kacang tanah tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,17. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman kacang tanah tersebut, menghasilkan keluaran (outcome) sebesar 1,17 satuan mata uang, atau sebesar Rp 1,17. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif efisien.

Kontribusi Pendapatan Petani Hutan Usahatani Kemitraan Pengelolaan *Social Forestry* Di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, Terhadap Pendapatan Keluarganya

Guna mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan petani hutan dari aktivitas usahatani kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, terhadap pendapatan keluarganya, akan dilihat dari sejumlah aspek usaha yang memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga tersebut. Pada dasarnya ada 4 (empat) aspek usaha yang ditekuni oleh para petani hutan peserta rehabilitasi.

Keempat aspek usaha tersebut adalah: (a) usahatani tumpangsari tanaman semusim (palawija) di sela-sela tanaman pokok di lahan kemitraan *social forestry*, (b) usahatani tanaman pokok di lahan kemitraan *social forestry*, (c) usahatani di lahan miliknya sendiri, serta (d) usaha lain di luar usahatani. Usaha lain di luar usahatani yang dimaksudkan adalah berternak, menyadap karet, serta lainnya. Kontribusi pendapatan petani hutan terhadap keluarga berdasarkan analisis finansial dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Besarnya Kontribusi Pendapatan Petani Hutan Peserta Rehabilitasi di Desa Wonoasri dari Usahatani Kemitraan *Social Forestry* di Taman Nasional Meru Betiri Terhadap Total Pendapatan Keluarganya, Berdasarkan Analisis Finansial

No	Secara Analisis Finansial	Rata2 per KK
1	Pendapatan dari UT Kemitraan <i>Social Forestry</i> (Rp/Tahun)	18,501,674.15
	1.1 Keuntungan dari UT Tumpangsari (Rp/Tahun)	9,508,642.83
	1.2 Keuntungan dari UT Tanaman Pokok (Rp/Tahun)	8,993,031.32
2	Pendapatan dari UT di Lahan Milik Sendiri (Rp/Tahun)	11,865,216.67
	2.1 Keuntungan UT Musim Tanam ke-1 (Rp/Tahun)	2,951,266.67
	2.2 Keuntungan UT Musim Tanam ke-2 (Rp/Tahun)	5,083,100.00
	2.3 Keuntungan UT Musim Tanam ke-3 (Rp/Tahun)	3,830,850.00
	2.4 Pendapatan Lain di Luar Usahatani (Rp/Tahun)	8,826,000.00
3	3.1 Keuntungan dari Memelihara Ternak (Rp/Tahun)	420,000.00
	3.2 Upah Menyadap Karet (Rp/Tahun)	4,886,000.00
	3.3 Pendapatan Lainnya (Rp/Tahun)	3,520,000.00
3	Total Pendapatan Keluarga Petani Hutan (Rp/Tahun)	39,192,890.82
4	Kontribusi (%)	47.21

Sumber : Data primer dioalah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 7, hasil analisis kontribusi secara finansial dapat diketahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dari usahatani di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri, terhadap keseluruhan pendapatan keluarganya, adalah sebesar 47,21%.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi secara ekonomik dapat diketahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dari usahatani di lahan kemitraan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, terhadap keseluruhan pendapatan keluarganya, adalah sebesar 41,85%. Hal ini semakin dapat merepresentasikan 'memang benar' atau 'nyata' (*signifikan*), bahwa kemitraan *social forestry* tersebut 'sangat membantu' petani hutan tersebut untuk meningkatkan pendapatan keluarganya, dan/atau kesejahteraan keluarganya. Atau semakin dapat mencerminkan, bahwa tingkat ketergantungan penghidupan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri tersebut,

terhadap aktivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*), memang nyata (signifikan) relatif tinggi.

Tabel 8. Besarnya Kontribusi Pendapatan Petani Hutan Peserta Rehabilitasi di Desa Wonoasri dari Usahatani Kemitraan *Social Forestry* di Taman Nasional Meru Betiri Terhadap Total Pendapatan Keluarganya, Berdasarkan Analisis Ekonomik

No	Secara Analisis Ekonomik	Rata2 per KK
1	Pendapatan dari UT Kemitraan <i>Social Forestry</i> (Rp/Tahun)	8,725,316.23
	1.1 Keuntungan dari UT Tumpangsari (Rp/Tahun)	2,290,241.51
	1.2 Keuntungan dari UT Tanaman Pokok (Rp/Tahun)	6,435,074.72
2	Pendapatan dari UT di Lahan Milik Sendiri (Rp/Tahun)	3,299,453.34
	2.1 Keuntungan UT Musim Tanam ke-1 (Rp/Tahun)	51.728,89
	2.2 Keuntungan UT Musim Tanam ke-2 (Rp/Tahun)	2.032.545,56
	2.3 Keuntungan UT Musim Tanam ke-3 (Rp/Tahun)	1.215.178,89
3	Pendapatan Lain di Luar Usahatani (Rp/Tahun)	8,826,000.00
	3.1 Keuntungan dari Memelihara Ternak (Rp/Tahun)	420,000.00
	3.2 Upah Menyadap Karet (Rp/Tahun)	4,886,000.00
	3.3 Pendapatan Lainnya (Rp/Tahun)	3,520,000.00
4	Total Pendapatan Keluarga Petani Hutan (Rp/Tahun)	20,850,769.57
5	Kontribusi (%)	41.85

Sumber : Data primer diolah Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 8 diatas, hasil analisis kontribusi, secara ekonomik dapat diketahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dari usahatani di lahan kemitraan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, terhadap keseluruhan pendapatan keluarganya, adalah sebesar 41,85%. Hal ini semakin dapat merepresentasikan ‘memang benar’ atau ‘nyata’ (*signifikan*), bahwa kemitraan *social forestry* tersebut ‘sangat membantu’ petani hutan tersebut untuk meningkatkan pendapatan keluarganya, dan/atau kesejahteraan keluarganya.

Rumusan Alternatif Kebijakan guna mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan pengelolaan sosial forestry di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri

Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Kunci

Faktor-faktor internal kunci (*intern key factors*) adalah berupa faktor kekuatan (*strength*) dan faktor kelemahan (*weaknes*) yang muncul, dan/atau terkandung, dari dalam lingkungan ‘kelembagaan kemitraan’ pada penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Termasuk didalamnya melingkupi yang muncul, dan/atau terkandung, dari dalam lingkungan ‘kelembagaan kemitraan’ di Desa Wonoasri. Sedangkan Faktor-faktor eksternal kunci (*extern key factors*) adalah berupa faktor peluang (*opportunity*) dan faktor ancaman (*threat*) yang muncul dari luar dan dalam lingkungan ‘kelembagaan kemitraan’ pada penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Matriks evaluasi faktor internal dapat dilihat pada Tabel 9 di atas. Berdasarkan Tabel 9 diatas, hasil analisis matriks evaluasi faktor internal (*matriks-IFI*) dapat diketahui bahwa, keberadaan ‘potensi dukungan’ faktor-faktor kunci yang muncul, dari dalam lingkungan kelembagaan kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk didalamnya yang muncul dari dalam lingkungan kelembagaan kemitraan di Desa Wonoasri, adalah ‘relatif lemah’. Indikasi ini ditunjukkan oleh total nilai yang dibobot pada matriks-IFI tersebut adalah ‘kurang dari 2,5’.

Tabel 9 Matriks Evaluasi Faktor Internal (Matriks-EFI)

Faktor Internal Kunci		Bobot	Urgensi	Nilai
A.	Faktor Kekuatan:			
1	Petani hutan peserta rehabilitasi relatif tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan inovasi usahatani hutan.	0,15	3	0,45
2	Petani hutan peserta rehabilitasi relatif mudah diorganisasikan dalam kelembagaan kelompok tani hutan.	0,15	2	0,30
Sub-Total		0,30		0,75
B.	Faktor Kelemahan:			
1	Tingkat kesadaran petani hutan peserta rehabilitasi terhadap ‘kesepahaman kemitraan’ masih relatif rendah	0,15	3	0,45
2	Tingkat kesadaran masyarakat desa hutan terhadap ‘eksistensi taman nasional’ masih relatif rendah.	0,15	2	0,30
3	Jumlah penyuluh lapangan (sebagai pembina) berpengalaman bagi petani hutan dari lingkup kedinasan taman nasional relatif sedikit.	0,10	1	0,10
4	Jumlah penyuluh lapangan swa-kelola (sebagai pembina) bagi petani hutan di lingkup taman nasional relatif sedikit.	0,10	1	0,10
5	Keberadaan biaya operasional pembinaan bagi petani hutan dari lingkup kedinasan taman nasional relatif kecil	0,20	3	0,60
Sub-Total		0,70		1,55
TOTAL		1,00		2,30

Sumber : Data primer diolah Tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis matriks evaluasi faktor internal (*matriks-IFI*) dapat diketahui bahwa, keberadaan ‘potensi dukungan’ faktor-faktor kunci yang muncul, dan/atau terkandung, dari dalam lingkungan kelembagaan kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk didalamnya yang muncul dari dalam lingkungan kelembagaan kemitraan di Desa Wonoasri, adalah ‘relatif lemah’. Indikasi ini ditunjukkan oleh total nilai yang dibobot pada matriks-IFI tersebut adalah ‘kurang dari 2,5’.

Tabel 10 menunjukkan hasil analisis matriks evaluasi faktor eksternal (*matriks-IFE*) diketahui bahwa, keberadaan ‘potensi dukungan’ faktor-faktor kunci yang muncul dari dalam luar lingkungan kelembagaan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk yang muncul dari luar lingkungan kelembagaan kemitraan di Desa Wonoasri, adalah ‘relatif lemah’. Indikasi ini ditunjukkan oleh total nilai yang dibobot pada matriks-IFE tersebut adalah ‘kurang dari 2,5’. Matriks evaluasi faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (Matriks-EFE)

Faktor Eksternal Kunci		Bobot	Urgensi	Nilai yang
C.	Faktor Peluang:			
1	Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan menjadi kebijakan utama pemerintah.	0,10	3	0,30
2	Sebagai motivasi karena adanya sorotan dunia terhadap kerusakan ekosistem taman nasional di Indonesia semakin gencar.	0,10	3	0,30
3	Lembaga, dan/atau organisasi, pembela kelestarian lingkungan dan hutan semakin banyak berkembang di masyarakat.	0,05	1	0,05
4	Sebagai motivasi karena adanya sorotan masyarakat terhadap buruknya kinerja pengelolaan taman nasional semakin gencar.	0,10	2	0,20
Sub-Total		0,35		0,85
D.	Faktor Ancaman:			
1	Kebijakan keperpindahan dari Pemerintah Daerah masih relatif rendah.	0,15	3	0,45
2	Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki aktivitas yang tidak berpihak.	0,10	2	0,20
3	Tokoh-tokoh agama lokal (Kiyai, Gus, Ra, Uztad) relatif masih belum banyak berperan.	0,20	3	0,60
4	Para pemburu lahan bermodal besar semakin aktif beroperasi	0,10	2	0,20
5	Lembaga-lembaga pemberdayaan (<i>institutional agent of empowering</i>) bagi petani hutan di lingkup taman nasional relatif sedikit.	0,10	1	0,10
Sub-Total		0,65		1,55
TOTAL		1,00		2

Sumber : Data primer diolah Tahun 2014

PEMBAHASAN

Model Kemitraan dan Pola Bagi Hasil (*Sharing*)

Pola ini termasuk dalam aktivitas kemitraan 'pola kerjasama sinergis'. Hal ini ditandakan bahwa pada pelaksanaannya menempatkan pihak petani hutan peserta rehabilitasi dan pihak pemangku kawasan hutan (Taman Nasional Meru Betiri), pada 'kedudukan yang setara'. Pada kedudukan yang setara dengan 'kelebihan' dan 'kekurangan' masing-masing yang dimilikinya, guna memperoleh nilai tambah (*value added*) dari aktivitas kemitraan tersebut.

Memiliki kedudukan yang setara, dalam arti bahwa pihak taman nasional 'bukanlah' merupakan 'bapak angkat' bagi petani hutan peserta rehabilitasi. Bapak angkat, dalam pengertian harus selalu melindungi, memfasilitasi, dan membesarkan para petani hutan peserta rehabilitasi tersebut sebagai anak-nya. Baik itu melindungi, memfasilitasi, dan membesarkan dalam penyediaan

modal, teknologi, pelatihan, maupun pemasaran produk yang dihasilkan petani hutan peserta rehabilitasi.

Pihak taman nasional tidak menempatkan dirinya (kelembagaannya) sebagai sebagai sumber modal, teknologi, pemasok input, dan pembeli produk yang dihasilkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi tersebut. Akan tetapi yang ada dan berlangsung adalah, bahwa pihak taman nasional mengajak petani hutan peserta rehabilitasi, untuk ikut serta secara bersama-sama mengelola zona rimba taman nasional yang telah rusak karena penjarahan yang berlangsung di era reformasi (tahun 1998), yaitu menanaminya dengan tanaman pokok, berupa tanaman hutan jenis kayu, dan/atau non-kayu (tanaman buah-buahan). Selain itu guna menambah penghasilan, pihak taman nasional masih 'memperbolehkan' para petani rehabilitasi mengusahakan tanaman semusim di sela-sela tanaman pokok tersebut. Tentunya sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan. Adapun tanaman pokok yang paling banyak ditanam petani peserta rehabilitasi adalah tanaman buah-buahan.

Manfaat (*benefit*) dari adanya aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan (*social forestry*) ini, pada akhirnya dapat dinikmati secara bersama-sama, sesuai dengan nilai tambah (*value added*) yang diharapkan masing-masing. Baik itu nilai tambah yang akan dapat dinikmati oleh pihak taman nasional di masa sekarang dan di masa depan, maupun nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani hutan peserta rehabilitasi di masa sekarang maupun di masa depan.

Manfaat pertama yang akan dapat dinikmati oleh pihak taman nasional adalah, dapat 'menghentikan kembali' zona rimba yang telah rusak. Walaupun dengan tutupan hutan non-kayu (tanaman buah-buahan). Dimasa depan tanaman-tanaman pokok yang ditanam petani hutan peserta rehabilitasi tersebut, pada akhirnya akan tubuh menjadi rerimbunan hutan. Dengan demikian status serta fungsi kawasan hutan di zona rehabilitasi ini sebagai penyangga taman nasional dapat dikembalikan lagi.

Manfaat yang dapat dirasakan atau diperoleh petani hutan peserta rehabilitasi, yaitu berupa: (a) hasil panen dari tanaman semusim (palawija) yang ditanam secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok, (b) hasil panen dari tanaman pokok, dimana sebagian besar adalah tanaman buah-buahan, serta (c) tambahan pendapatan keluarga dari hasil usahatani tanaman pokok dan tumpangsari di areal *social forestry* tersebut.

Terkait dengan manfaat berupa adanya tambahan pendapatan keluarga petani hutan peserta rehabilitasi dari hasil usahatani tanaman pokok dan tumpangsari di areal *social forestry*. Dipercaya akan dapat menjadi faktor pendorong/pendorong (*trigger factor*) bagi terwujudnya (tercapainya) manfaat kedua bagi pihak taman nasional. Yaitu, mampu menghindarkan zona inti taman nasional dari 'potensi' ancaman dan gangguan penjarahan oleh masyarakat. Termasuk didalamnya masyarakat yang berada di desa Wonosari.

Manfaat yang didapatkan oleh pihak taman nasional adalah berupa 'manfaat implisit' (*implicit benefit*), atau manfaat tersembunyi. Sedangkan manfaat yang diterima oleh petani (petani hutan) peserta rehabilitasi adalah berupa 'manfaat eksplisit' (*explicit benefit*), atau manfaat kentara.

Nilai tambah (*value added*) yang dapat diterima oleh pihak taman nasional, adalah 'jaminan rasa aman' akan kelestarian 'kawasan penyangga taman nasional' dari 'potensi' ancaman dan gangguan penjarahan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional. Termasuk didalamnya mereka yang berada di desa Wonosari. Sedangkan nilai tambah yang dapat diterima oleh petani hutan peserta rehabilitasi, adalah adanya tambahan pendapatan keluarga dari dari hasil mengelola secara kerjasama kemitraan zona rehabilitasi taman nasional. Dengan demikian tingkat kesejahteraan keluarganya menjadi relatif meningkat.

Sisi 'tipe' aktivitas kemitraan yang diterapkan tersebut termasuk dalam 'tipe sinergis saling menguntungkan'. Alasannya, bahwasanya aktivitas kemitraan yang dikembangkan tersebut, kemanfaatannya (*benefit-nya*) dapat dinikmati secara bersama-sama, sesuai dengan 'nilai tambah' (*value added*) masing-masing.

Selain itu juga karena dibangun (dikembangkan) berdasarkan 'basis kesadaran' saling membutuhkan dan saling mendukung dari masing-masing pihak yang bermitra. Dimana aktivitas kemitraan yang dibangun tersebut, 'tidak' memiliki karakteristik 'hubungan formal yang kuat'. Bentuk hubungan formal yang kuat dapat dimanifestasikan dalam sebuah 'perjanjian kontrak kerjasama usaha' yang 'mengikat kuat', diantara kedua belah pihak yang bermitra. Akan tetapi kemitraan yang dibangun dan dijalankan ini, hanya diikat oleh 'kesepahaman bersama' atas basis kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung antara pihak Taman Nasional Meru Betiri dengan pihak petani hutan peserta rehabilitasi.

Apabila dilihat dari sisi 'tipe'-nya ini, aktivitas kerjasama kemitraan yang diterapkan tersebut 'bukanlah' tipe 'dispersal' melainkan tipe 'sinergis Dan saling menguntungkan'. Mengingat apabila kemitraan yang dibangun (dikembangkan) tersebut bertipe dispersal, maka akan menempatkan posisi pihak taman nasional memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat. Utamanya guna mengatur sharing (pembagian) dari keuntungan (*profit*), dan/atau manfaat (*benefit*), yang diperoleh oleh para petani hutan peserta rehabilitasi.

Para petani hutan peserta rehabilitasi tersebut diperlakukan sebagai 'parner usaha' dalam arti yang sebenarnya. Hal demikian ini sebagaimana yang terjadi pada sejumlah kasus kersjasama kemitraan yang dibangun dan dikembangkan di lingkup Perum Perhutani dan/atau Inhutani. Akan tetapi, aktivitas kemitraan yang dibangun dan dijalankan dalam penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* ini, tidaklah menunjukkan perilaku (*behavior*) yang demikian ini. Dimana pada dasarnya hanya dibangun oleh kesepahaman bersama atas basis kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung antara pihak taman nasional dengan pihak petani hutan peserta rehabilitasi.

Sisi perkembangannya (*kematangannya*), aktivitas kemitraan yang dibangun dan dijalankan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) tersebut, termasuk dalam 'aktivitas kemitraan tahap utama (lanjut)'. Mengingat pada dasarnya pihak taman nasional 'lebih banyak' memberikan pembinaan (dalam bentuk bimbingan teknis maupun non-teknis) kepada para petani hutan peserta rehabilitasi, dibandingkan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan. Memang ada bantuan sarana produksi, akan tetapi tercatat dalam porsi yang relatif kecil apabila dibandingkan dari biaya yang harus dikeluarkan (ditanggung) oleh pihak taman nasional untuk aktivitas pembinaan. Tercatat bantuan sarana produksi yang diberikan hanyalah bibit tanaman pokok.

Membangun dan mengembangkan aktivitas pembinaan, dimana porsi biaya (pendanaan) terbesar dipergunakan untuk hal ini, pihak taman nasional menyediakan tenaga-tenaga penyuluh berpengalaman. Baik itu berasal dari dalam lingkungan kedinasan Taman Nasional Meru Betiri sendiri, maupun berasal dari luar lingkungan kedinasan (penyuluh swakelola maupun penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat/LSM yang menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Taman Nasional Meru Betiri tersebut).

Pola Bagi Hasil (*Sharing*)

Tumbuh dan berkembangnya suatu aktivitas kerjasama kemitraan (*partnership*) sudah tentu akan dipengaruhi oleh keberadaan faktor sharing (pembagian bersama atas hal tertentu). Di dalam aktivitas kemitraan dimanapun, termasuk didalamnya aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, akan dijumpai 3 (tiga) bentuk sharing, yaitu: (a) *cost sharing* (pembagian beban atas biaya), (b) *benefit sharing* (pembagian atas kemanfaatan yang didapatkan), dan (c) *risk sharing* (pembagian beban atas risiko yang kemungkinan muncul).

Sisi *cost sharing* (berbagi atas beban biaya), secara eksplisit (*explicit*) atau kentara, pihak Taman Nasional Meru Betiri tampak menanggung beban biaya (*explicit cost*) yang 'relatif lebih kecil', apabila dibandingkan dengan beban biaya (*explicit cost*) yang harus ditanggung oleh pihak petani hutan peserta rehabilitasi.

Adapun beban biaya eksplisit (*explicit cost*) dalam aktivitas kemitraan usahatani hutan ini, diantaranya adalah: (a) tenaga kerja luar keluarga untuk pengolahan tanah, (b) pengadaan bibit tanaman pokok, (c) pengadaan benih tanaman semusim (palawija) tumpangsari, (d) tenaga kerja luar keluarga untuk pemerilaahaan tanaman, (e) pengadaan pupuk dan pestisida (fungisida, herbisida, insektisida), (f) pengadaan alat-alat pertanian, (g) tenaga kerja luar keluarga untuk penanganan panen dan/atau pasca panen, serta (g) transportasi.

Beban biaya eksplisit tersebut, hanya biaya pengadaan bibit tanaman pokok, yaitu berupa bibit tanaman hutan jenis kayu dan non-kayu (tanaman buah-buahan), yang menjadi tanggungan sharing pihak Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan beban biaya eksplisit yang lainnya menjadi tanggungan sharing pihak petani hutan peserta rehabilitasi. Dengan demikian secara eksplisit memang tampak beban sharing biaya dalam aktivitas kemitraan usahatani hutan tersebut, pihak Taman Nasional Meru Betiri menanggung relatif lebih kecil. Akan tetapi apabila dicermati secara implisit (*implicit*), pada dasarnya beban biaya (*implicit cost*) yang menjadi tanggungan pihak Taman Nasional Meru Betiri adalah relatif 'lebih besar' dibandingkan dengan beban yang ditanggung oleh pihak petani hutan peserta rehabilitasi. Ada sejumlah beban biaya implisit (tersembunyi) dalam aktivitas kemitraan usahatani hutan tersebut, diantaranya: (a) nilai sewa lahan (dengan asumsi diperhitungkan), (b) biaya untuk aktivitas pembinaan kepada petani hutan peserta rehabilitasi, dan (c) tenaga kerja dalam keluarga untuk usahatani hutan tersebut.

Diketahui dari semua beban biaya implisit tersebut, hanya biaya tenaga kerja dalam keluarga untuk usahatani hutan ini yang menjadi tanggungan sharing para petani hutan peserta rehabilitasi. Sedangkan nilai sewa lahan (dengan asumsi diperhitungkan) dan biaya untuk aktivitas pembinaan kepada petani hutan peserta rehabilitasi, dimana jumlahnya relatif besar, adalah menjadi tanggungan pihak Taman Nasional Meru Betiri.

Sisi benefit sharing (pembagian atas kemanfaatan yang didapatkan), secara eksplisit (*explicit*) atau kentara, aktivitas kemitraan yang diterapkan, pihak petani hutan peserta rehabilitasi mendapatkan 'semua bagian' kemanfaatan eksplisitnya. Sedangkan pihak Taman Nasional Meru Betiri 'tidak' mendapatkan bagian dari adanya kemanfaatan eksplisit tersebut. Pihak Taman Nasional hanya ingin memperoleh manfaat yaitu penggunaan lahan yang baik dengan adanya penanaman kembali lahan rusak dengan tanaman pohon 'inti' sebagai penyangga hutan.

Dijelaskan pada paparan sebelumnya, bahwa secara eksplisit kemanfaatan yang dapat diperoleh dari adanya aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* ini, adalah: (a) pendapatan dari hasil panen tanaman pokok (sebagian terbesar tanaman buah-buahan), dan (b) pendapatan dari hasil panen tanaman semusim (palawija) yang diusahakan secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok. Adapun pihak taman nasional sama sekali 'tidak memungut' bagian dari hasil-hasil panen tersebut dari para petani hutan peserta rehabilitasi. Akan tetapi secara implisit (*implicit*), bagian sharing kemanfaatan yang diterima oleh pihak taman nasional dan pihak petani hutan peserta rehabilitasi, adalah relatif 'berimbang' (*balance*). Kemanfaatan implisit tersebut diantaranya adalah: (a) di masa depan dapat dikembalikannya 'status' dan 'fungsi' hutan di zona rimba taman nasional yang telah dijarah masyarakat, (b) baik di masa sekarang maupun di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, dan/atau hingga dihilangkan, potensi ancaman perambahan terhadap zona inti taman nasional oleh masyarakat, serta (c) tingkat kesejahteraan keluarga petani hutan peserta rehabilitasi relatif meningkat.

Sisi risiko (*risk*), secara eksplisit (*explicit*), potensi risiko yang muncul diantaranya adalah: (a) hasil panen tanaman tumpangsari semusim (palawija) menurun karena tutupan kanopi tanaman pokok yang semakin membesar, dan (b) hasil penen tanaman pokok (utamanya jenis tanaman buah-buahan) menurun karena kendala alam. Dimana kedua potensi risiko ini tentunya akan mengena (menimpa) pada pihak petani hutan peserta rehabilitasi. Sedangkan pihak taman nasional tidak akan terkena

(tertimpa) kedua potensi risiko tersebut, karena sama sekali 'tidak memungut' bagian dari hasil-hasil panen ini dari para petani hutan peserta rehabilitasi.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Tumpangsari

Mayoritas petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri menanam tanaman PJ secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok di lahan kemitraan social forestry Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Rata-rata luasan lahan kemitraan yang dikelola per kepala keluarga (KK) petani hutan adalah 0,44 Ha per KK. Hasil panen yang diperoleh per KK petani tanaman PJ selama 1 (satu) tahun usahatani, rata-rata sebesar 316,53 Kg. Tingkat harga biji PJ di tingkat petani adalah Rp 50.000 per Kg. Rata-rata nilai penerimaan per KK petani hutan peserta rehabilitasi tersebut dari usahatani tanaman PJ adalah Rp 15.826.716,98.

Dianalisis secara finansial, yaitu dengan hanya memasukkan unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) saja, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman PJ tersebut adalah Rp 6,318,074.15 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani dapat memperoleh keuntungan secara finansial dari usahatani tanaman PJ yang diusahakan secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok, di lahan kemitraan social forestry Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 9,508,642.83.

Usahatani tanaman PJ tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 2,50. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya perusahaan tanaman PJ tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 2,50 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,50. Berarti tercatat relatif efisien.

Dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (*total cost*), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman PJ tersebut adalah Rp 13,536,475.47 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani tanaman PJ yang diusahakan secara tumpangsari di sela-sela tanaman pokok, di lahan kemitraan social forestry Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 2,290,241.51. Secara ekonomik usahatani tanaman PJ tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,17. Artinya adalah, dari setiap Rp 1,- rupiah yang dikeluarkan untuk biaya perusahaan tanaman PJ tersebut, menghasilkan sebesar Rp 1,17. Berarti tercatat relatif efisien.

Adapun yang termasuk unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*), atau biaya yang benar-benar (*rirel*) dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani tanaman PJ tersebut, antara lain: (a) nilai pembelian benih (seluruhnya dari hasil pembelian), (b) nilai pembelian pupuk (kandang, Urea, Gandasil B, Kalsium, NPK cair), (c) nilai pembelian pestisida (desis, green ionic), (d) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (terpal, karung), (e) nilai upah tenaga kerja luar keluarga, dan (f) biaya transportasi.

Unsur-unsur biaya implisit (*implicit cost*), atau biaya tersembunyi, atau biaya yang 'diasumsikan' diperhitungkan, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani tanaman PJ tersebut, antara lain: (a) nilai sewa lahan, (b) nilai pajak lahan, (c) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (cangkul, sabit), serta (c) nilai upah tenaga kerja dalam keluarga.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Tanaman Pokok

Tanaman pokok yang ditanam petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri di lahan kemitraan Taman Nasional Meru Betiri, diantaranya adalah alpukat, nangka, dan pete. Dengan rata-rata luasan lahan kemitraan 0,44 Ha per KK, dapat diketahui rata-rata penerimaan per KK petani hutan di Desa Wonoasri, dari usahatani tanaman pokok dengan ketetapan batas umur pertumbuhan antara 8 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, adalah sebesar Rp 14,602,022.64.

Dianalisis secara finansial, yaitu dengan hanya memasukkan unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) saja, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman pokok tersebut adalah Rp 5,608,991.32 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara finansial dari usahatani tanaman pokok yang diusahakan di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 8,993,031.32.

Usahatani tanaman pokok tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 2,60. Artinya adalah, dari setiap Rp 1,- yang dikeluarkan untuk biaya perusahaan tanaman pokok tersebut, menghasilkan sebesar Rp 2,60. Berarti tercatat relatif efisien.

Dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (*total cost*), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani tanaman pokok tersebut adalah Rp 8,140,415.09 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani tanaman pokok yang diusahakan, di lahan kemitraan social forestry Taman Nasional Meru Betiri tersebut, adalah sebesar Rp 6,461,607.55. Secara ekonomik usahatani tanaman pokok tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,79. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya perusahaan tanaman pokok tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 1,79 satuan mata uang, atau sebesar Rp 1,79. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif efisien. Adapun yang termasuk unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*), atau biaya yang benar-benar (*rirel*) dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani tanaman pokok tersebut, antara lain: (a) nilai pembelian pupuk (Urea, ZA), (b) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (karung), serta (c) nilai upah tenaga kerja luar keluarga.

Unsur-unsur biaya implisit (*implicit cost*), atau biaya tersembunyi, atau biaya yang 'diasumsikan' diperhitungkan, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani tanaman pokok tersebut, antara lain: (a) nilai pengadaan (pembelian) sebagian pupuk (kandang), (b) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (cangkul, sabit), serta (c) nilai upah tenaga kerja dalam keluarga.

Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Lahan Milik Sendiri

Musim tanam *ke-1* (pertama) para petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri ini, menanam lahan sawah miliknya sendiri dengan tanaman padi. Rata-rata produksi padi yang dihasilkan dari rata-rata luasan lahan 0,29 Ha per KK tersebut, adalah 1.400 Kg (1,4 ton) gabah kering sawah (GKS). Atau sebanyak 640 Kg (0,64 ton) gabah kering giling (GKG). Tingkat harga rata-rata gabah kering diling yang diterima petani adalah Rp 5.300 per Kg. Rata-rata nilai penerimaan per KK petani hutan dari usahatani padinya adalah Rp 4.452.000. Apabila dianalisis secara finansial, yaitu dengan hanya memasukkan unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) saja, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani padi tersebut adalah Rp 1.860.733 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara finansial dari usahatani padi yang diusahakan pada musim tanam *ke-1* di lahan miliknya, adalah sebesar Rp 2.591.266,97.

Usahatani padi tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 2,39. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya perusahaan tanaman padi tersebut, menghasilkan keluaran (*outcome*) sebesar 2,39 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,39. Berarti tercatat relatif efisien.

Dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (total cost), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (explicit cost) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (implicit cost), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani padi tersebut adalah Rp 4.440.271 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani padi yang diusahakan pada musim tanam ke-1 di lahan miliknya, hanya sebesar Rp 51.728,89. Secara ekonomik usahatani padi tersebut relatif kurang efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,01. Artinya adalah, dari setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan untuk biaya pengusahaan tanaman padi tersebut, hanya menghasilkan Rp 1,01,- saja. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif kurang efisien.

Unsur-unsur biaya eksplisit (explicit cost), atau biaya yang benar-benar (riel) dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani padi tersebut, antara lain: (a) nilai pajak lahan, (b) nilai iuran pengairan, (c) nilai pembelian benih (bukan milik sendiri), (d) sewa bajak (traktor), (e) nilai pembelian pupuk (Urea, ZA, lainnya), (f) nilai pembelian pestisida (desis, lainnya), (g) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (karung, treser), (h) nilai upah tenaga kerja luar keluarga, serta (i) biaya transportasi. Sedangkan unsur-unsur biaya implisit (implicit cost), atau biaya tersembunyi, atau biaya yang 'diasumsikan' diperhitungkan, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani padi tersebut, antara lain: (a) nilai sewa lahan, (b) nilai pengadaan (pembelian) benih milik sendiri, (c) nilai sewa bajak (hewan) milik sendiri, (d) nilai sewa (pembelian) alat pertanian milik sendiri (cangkul, sabit, terpal, lainnya), serta (d) nilai upah tenaga kerja dalam keluarga.

Musim tanam ke-2 (kedua) para petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri ini, menanam lahan (lahan sawah) miliknya sendiri (hak milik) dengan tanaman jagung. Rata-rata produksi jagung yang dihasilkan dari rata-rata luasan lahan 0,29 Ha per KK tersebut, adalah 2.808,33 Kg jagung tongkol kering sawah. Atau sebesar 1.965,83 Kg jagung tongkol kering giling. Tingkat harga rata-rata jagung tongkol kering giling yang diterima petani adalah Rp 3.100 per Kg. Dengan demikian rata-rata nilai penerimaan per KK petani hutan peserta rehabilitasi tersebut dari usahatani jagungnya adalah sebesar Rp 8.705.833,33.

Dianalisis secara finansial, yaitu dengan hanya memasukkan unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) saja, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani jagung tersebut adalah Rp 13.622.733,33 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara finansial dari usahatani jagung yang diusahakan pada musim tanam ke-2 di lahan miliknya, adalah sebesar Rp 5.083.100.

Usahatani jagung tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 2,4. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1 yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman jagung tersebut, menghasilkan keluaran (outcome) sebesar 2,4 satuan mata uang, atau sebesar Rp 2,4. Berarti tercatat relatif efisien.

Dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (total cost), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (*explicit cost*) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (*implicit cost*), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani jagung tersebut adalah Rp 6.673.287,78 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani jagung yang diusahakan pada musim tanam ke-2 di lahan miliknya, adalah sebesar Rp 2.032.545,86. Secara ekonomik usahatani jagung tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,30. Artinya adalah, dari setiap Rp 1 yang dikeluarkan untuk biaya pengusahaan tanaman padi tersebut, hanya menghasilkan Rp 1,3. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif efisien. Adapun yang termasuk unsur-unsur biaya eksplisit (*explicit cost*), atau biaya yang benar-benar

(riel) dikeluarkan oleh petani hutan pada usahatani jagung tersebut, antara lain: (a) nilai pajak lahan, (b) nilai iuran pengairan, (c) nilai pembelian benih, (d) nilai sewa bajak (traktor), (e) nilai pembelian pupuk (sebagian pupuk kandang, Urea, Ponska, lainnya), (f) nilai pembelian pestisida (puradan, lainnya), (f) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (karung), (h) nilai upah tenaga kerja luar keluarga, serta (c) biaya transportasi.

Unsur-unsur biaya implisit (implicit cost), atau biaya tersembunyi, atau biaya yang 'diasumsikan' diperhitungkan akan tetapi tidak dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani jagung tersebut, antara lain: (a) nilai sewa lahan, (b) nilai sewa bajak (hewan) milik sendiri, (c) nilai sewa alat pertanian milik sendiri (cangkul, sabit, terpal, lainnya), serta (d) nilai upah tenaga kerja dalam keluarga.

Musim tanam ke-3 (ketiga) para petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri ini, menanam lahan (lahan sawah) miliknya sendiri (hak milik) dengan tanaman kacang tanah. Rata-rata produksi jagung yang dihasilkan dari rata-rata luasan lahan 0,29 Ha per KK tersebut, adalah 2.736,67 Kg kacang tanah kering sawah. Atau sebesar 2.189,33 Kg kacang tanah kering giling. Tingkat harga rata-rata kacang tanah kering giling yang diterima petani adalah Rp 3.000 per Kg. Dengan demikian rata-rata nilai penerimaan per KK petani hutan peserta rehabilitasi tersebut dari usahatani kacang tanahnya adalah sebesar Rp 8.210.000.

Dianalisis secara finansial, yaitu dengan hanya memasukkan unsur-unsur biaya eksplisit (explicit cost) saja, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani kacang tanah tersebut adalah Rp 4.379.150 per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri, dapat memperoleh keuntungan secara finansial dari usahatani kacang tanah yang diusahakan pada musim tanam ke-3 di lahan miliknya, adalah sebesar Rp 3.830.850. Usahatani kacang tanah tersebut secara finansial tercatat relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang didapatkan, yaitu sebesar 1,87. Artinya adalah, dari setiap Rp 1,- yang dikeluarkan untuk biaya pengusahaan tanaman kacang tanah tersebut, menghasilkan sebesar Rp 1,87,-. Berarti tercatat relatif efisien.

Dianalisis secara ekonomik, yaitu dengan memasukkan semua unsur biaya (total cost), berupa seluruh unsur biaya eksplisit (explicit cost) ditambah dengan seluruh unsur biaya implisit (implicit cost), rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk usahatani kacang tanah tersebut adalah Rp 6.994.821,11,- per KK petani. Dengan demikian rata-rata setiap KK petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dapat memperoleh keuntungan secara ekonomik dari usahatani kacang tanah yang diusahakan pada musim tanam ke-3 di lahan miliknya, adalah sebesar Rp 1.215.178,89,-. Secara ekonomik usahatani kacang tanah tersebut relatif efisien. Hal ini direpresentasikan dari hasil analisis RC-ratio yang sebesar 1,17. Artinya adalah, dari setiap 1 (satu) satuan mata uang, atau setiap Rp 1,- rupiah yang dikeluarkan (dikorbankan) untuk biaya pengusahaan tanaman kacang tanah tersebut, menghasilkan keluaran (outcome) sebesar 1,17 satuan mata uang, atau sebesar Rp 1,17,-. Berarti dapat dikatakan tercatat relatif efisien. Adapun yang termasuk unsur-unsur biaya eksplisit (explicit cost), atau biaya yang benar-benar (riel) dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani kacang tanah tersebut, antara lain: (a) pajak lahan, (b) iuran pengairan, (c) nilai pembelian benih (bukan milik sendiri), (d) sewa bajak (traktor), (e) nilai pembelian pupuk (sebagian pupuk kandang, Urea, Ponska, lainnya), (d) nilai pembelian pestisida (puradan, lainnya), (f) nilai sewa (pembelian) sebagian alat pertanian (karung), (h) nilai upah tenaga kerja luar keluarga, serta (c) biaya transportasi.

Unsur-unsur biaya implisit (implicit cost), atau biaya tersembunyi, atau biaya yang 'diasumsikan' diperhitungkan akan tetapi tidak dikeluarkan oleh petani hutan peserta rehabilitasi pada usahatani jagung tersebut, antara lain: (a) nilai sewa lahan, (b) nilai pengadaan (pembelian) benih milik sendiri, (c) nilai pengadaan (pembelian) pupuk kandang milik sendiri, (d) nilai sewa alat pertanian milik sendiri (cangkul, sabit, terpal, lainnya), serta (d) nilai upah tenaga kerja dalam keluarga.

Kontribusi Pendapatan Petani Hutan Dari Aktivitas Usahatani Kemitraan Pengelolaan *Social Forestry* Di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri Terhadap Pendapatan keluarganya

Hasil analisis kontribusi, secara finansial dapat diketahui besarnya kontribusi pendapatan petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri dari usahatani di lahan kemitraan *social forestry* Taman Nasional Meru Betiri, terhadap keseluruhan pendapatan keluarganya, adalah sebesar 47,21%. Hal ini dapat merepresentasikan, bahwa kemitraan *social forestry* tersebut relatif 'sangat membantu' petani hutan tersebut untuk meningkatkan pendapatan keluarganya, dan/atau kesejahteraan keluarganya. Atau dapat juga mencerminkan, bahwa tingkat ketergantungan ekonomi keluarga petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri tersebut, terhadap aktivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) relatif tinggi.

Rumusan Alternatif Kebijakan guna mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri

Hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa, strategi terpilih (*grand strategy*) guna merumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipandang efektif untuk mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan pada penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk didalamnya keberlanjutannya di Desa Wonoasri, adalah 'strategi WT' (*weaknes-threat*). Pilihan dijumpai pada strategi WT, karena memiliki komulatif nilai yang dibobot dalam kolom interaksi SWOT paling besar dibandingkan pada pilihan strategi lainnya dan merupakan hasil perhitungan dari koordinat analisis internal dan koordinat analisis eksternal untuk kemudian keduanya ditarik garis untuk mengetahui area strategi yang sesuai. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Strategi ini, strategi WT, adalah merupakan strategi yang bersifat defensif yang diarahkan untuk 'mengurangi kelemahan internal' dan 'menghindari ancaman eksternal'. Dengan kalimat lain dapat dikatakan, guna mengembangkan secara keberlanjutan aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk didalamnya keberlanjutannya di Desa Wonoasri, dirasa akan efektif apabila ditempuh kebijakan 'mengurangi kelemahan internal' dan 'menghindari ancaman eksternal'.

Tabel 10 Hasil Analisis SWOT

	Kekuatan (<i>strength</i>) Nilai dibobot = 0,75	Kelemahan (<i>weaknes</i>) Nilai dibobot = 1,55
Peluang (<i>opportunity</i>) Nilai dibobot = 0,85	1,60	2,40
Ancaman (<i>threat</i>) Nilai dibobot = 1,55	2,30	3,10

Sumber : Data primer diolah tahun 2014

Adapun representasi dari rumusan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Secara berkelanjutan (*sustainable*) meningkatkan kesadaran petani hutan dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) peserta rehabilitasi terhadap 'kesepahaman kemitraan' dan 'eksistensi taman nasional'. (2) Berupaya menambah jumlah penyuluh, dan/atau penyuluh berpengalaman, dari lingkup kedinasan Taman Nasional Meru Betiri sebagai pembina dan pemberdaya petani hutan peserta rehabilitasi. (3) Berupaya mendapatkan dukungan dana yang optimal guna membiayai aktivitas pembinaan kepada petani hutan peserta rehabilitasi. (4) Secara berkelanjutan (*sustainable*) mengajak Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat, dan stakeholder untuk dapat bersama-sama bekerjasama mewujudkan dan mengimplementasikan kebijakan keperpihkan terhadap aktivitas pembinaan dan pemberdayaan petani hutan peserta rehabilitasi pada khususnya,

serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) pada umumnya guna menciptakan keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian kawasan Taman Nasional Meru Betiri. (5) Aktif melakukan kampanye kepada lembaga-lembaga, dan/atau organisasi-organisasi pembela kelestarian lingkungan hidup, baik dari dalam maupun luar negeri, guna ikut serta berperan aktif dalam program pemberdayaan petani hutan peserta rehabilitasi pada khususnya, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) pada umumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, berpola 'kerjasama sinergis', bertipe 'sinergis saling menguntungkan', dan berkembang sebagai 'kemitraan tahap madya'.
2. Secara eksplisit (*explicit*), *cost sharing* pihak Taman Nasional Meru Betiri dalam aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, tercatat relatif lebih kecil, apabila dibandingkan dengan *cost sharing* pihak petani hutan peserta rehabilitasi. Akan tetapi secara implisit (*implicit*) justru sebaliknya. Dari sisi *benefit sharing*, semua bentuk kemanfaatan eksplisit (*explicit benefit*) dari aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, dimiliki oleh petani hutan peserta rehabilitasi. Akan tetapi secara implisit, *benefit sharing* yang diterima pihak petani hutan tersebut dengan yang diterima oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri, tercatat relatif berimbang (*balance*). Dari sisi *risk sharing*, secara eksplisit potensi risiko yang ditanggung petani hutan peserta rehabilitasi dari aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Desa Wonoasri SPTN II Taman Nasional Meru Betiri, relatif lebih rendah. Sedangkan secara implisit, bentuk risiko yang muncul, keseluruhan menjadi beban pihak Taman Nasional Meru Betiri.
3. Aktivitas kemitraan penyelenggaraan pengelolaan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, relatif sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian keluarga, dan/atau peningkatan kesejahteraan keluarga, petani hutan peserta rehabilitasi di Desa Wonoasri. Mengingat kontribusi pendapatan dari usahatani di lahan *social forestry* terhadap pendapatan keluarga, relatif besar. Berdasarkan perhitungan secara finansial sebesar 47,21%, dan berdasarkan perhitungan secara ekonomik sebesar 41,85%.
4. Strategi terpilih guna dapat merumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipandang efektif (*grand strategy* kebijakan) guna mengembangkan secara keberlanjutan (*sustainable*) aktivitas kemitraan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk keberlanjutannya di Desa Wonoasri, adalah 'strategi WT' (*weaknes-threat*).
5. *Grand strategy* kebijakan guna mengembangkan secara keberlanjutan aktivitas kemitraan *social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri, termasuk keberlanjutannya di Desa Wonoasri, adalah mengurangi kelemahan internal yang muncul 'dari dalam' lingkungan kelembagaan kemitraan, dan menghindari ancaman eksternal yang muncul 'dari luar' lingkungan kelembagaan kemitraan.

SARAN

1. Perlu adanya sistem kemitraan yang baru untuk menggantikan kemitraan yang telah ada dengan beberapa perbaikan dengan aturan-aturan yang lebih baku dan jelas serta memiliki dasar hukum yang kuat untuk lebih menguatkan posisi Taman Nasional sebagai pengelola Hutan untuk kemudia secara berkelanjutan (*sustainable*) untuk: (a) meningkatkan kesadaran petani hutan peserta

rehabilitasi terhadap ‘kesepahaman kemitraan’, (b) meningkatkan kesadaran masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) terhadap ‘eksistensi taman nasional’, (c) mengajak Pemerintah Daerah dapat mewujudkan dan mengimplementasikan kebijakan keperpihakan terhadap aktivitas pembinaan dan pemberdayaan petani hutan peserta, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) pada umumnya, (d) mengajak lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mewujudkan program aksi keperpihakan kepada misi yang diemban taman nasional, serta (e) menguatkan kerjasama antar *stakeholder* guna mengikis semaksimal mungkin, hingga menghilangkan, aktivitas para pemburu lahan yang beroperasi di lingkungan para petani hutan peserta rehabilitasi.

2. Berupaya untuk: (a) menambah jumlah penyuluh, dan/atau penyuluh berpengalaman, dari lingkup kedinasan Taman Nasional Meru Betiri sebagai pembina dan pemberdaya petani hutan peserta rehabilitasi, (b) menambah jumlah penyuluh swa-kelola sebagai pembina dan pemberdaya petani hutan peserta rehabilitasi, serta (c) mendapatkan dukungan dana yang optimal guna membiayai aktivitas pembinaan kepada petani hutan peserta rehabilitasi.
3. Memanfaatkan peran tokoh-tokoh agama lokal (Kiyai, Gus, Ra, Uztad) dalam aktivitas pendampingan dan pemberdayaan petani hutan peserta rehabilitasi pada khususnya, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) pada umumnya.
4. Aktif melakukan kampanye kepada lembaga-lembaga, dan/atau organisasi-organisasi pembela kelestarian lingkungan hidup, baik dari dalam maupun luar negeri, guna ikut serta berperan aktif dalam program pemberdayaan petani hutan peserta rehabilitasi pada khususnya, serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan taman nasional (masyarakat desa hutan) pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Aryo Fajar Sunartomo, SP, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, dan kepada para petani wilayah STPN II Taman Nasional Meru Betiri, serta pihak-pihak terkait lainnya yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya. 1992. *Kebijakan dan Implementasi Desentralisasi Urusan Kehutanan*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- David, F. R. 2002. *Manajemen Strategik*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Dephut. 2002. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.

Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan. 2003. *Pedoman Umum Pembuatan Rencana Teknik Social Forestry (RTSF)*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.

Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan. 2004. *Pedoman Umum Pembuatan Rencana Teknik Social Forestry (RTSF)*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.

Ditjen PHKA. 2006. *Mengenal 21 Taman Nasional Model di Indonesia*. Jakarta: Sub-Direktorat Informasi Konservasi Alam, Ditjen PHKA, Dephut.

Egger, K., dan Martens. 1981. *Ekofarming dan Implementasi di Rwanda – Afrika Timur*, dalam Espiq (1988), *Ekologi*. Jakarta: Obor Indonesia.

Ember and Ember. 1992. *Sustainable Development of Forest, Land, and Water: A World Bank Country Study*. Washington DC: The World Bank.

Hadi, S. 2013. *Tekanan Penduduk Terhadap Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Jember Jawa Timur*. Tesis. Yogyakarta: PS Ilmu Kehutanan Program Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.